

Public Ethics and the Legitimacy of Indonesian Democracy: Protests over DPR Allowances, Elite Conflict, and Civil Response

Etika Publik dan Legitimasi Demokrasi Indonesia: Protes Tunjangan DPR, Konflik Elite, dan Respons Sipil

M. Reza Saputra

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ mrezasaputra794@gmail.com

Keyword:

Coalition Dynamics; Democratic Legitimacy; Elite Impunity; Public Ethics; Social Mobilization.

Kata Kunci:

Dinamika Koalisi; Etika Publik; Impunitas Elite; Legitimasi Demokrasi; Mobilisasi Sosial.

Abstract

This study examines the August 2025 controversy over parliamentary allowances in Indonesia as a critical case of public ethics failure and its impact on democratic legitimacy. By applying a qualitative case-study approach and critical discourse analysis of primary news sources and academic literature, the research investigates elite rhetoric and actions that revealed profound disconnects from citizen realities. It further explores how digitally mediated civil responses transformed latent frustration into coordinated mass protests, amplifying challenges to institutional trust. The analysis situates these events within structural weaknesses of Indonesia's "fat coalition" system, demonstrating how the absence of effective legislative opposition fosters elite impunity and ethical erosion. Findings highlight the causal sequence from coalition dynamics to oversight failure, elite misconduct, civic mobilization, and legitimacy crisis. The study concludes that without fundamental reforms to strengthen checks and balances particularly a functional legislative opposition Indonesia's democracy remains vulnerable to recurring cycles of elite impunity and public distrust.

Abstrak

Penelitian ini menelaah kontroversi tunjangan parlemen Agustus 2025 di Indonesia sebagai kasus kritis kegagalan etika publik dan dampaknya terhadap legitimasi demokrasi. Dengan pendekatan studi kasus kualitatif dan analisis wacana kritis atas sumber berita primer dan literatur akademis, penelitian mengkaji retorika dan tindakan elite yang mengungkap keterputusan mendalam dari realitas warga. Selanjutnya, studi mengeksplorasi bagaimana respons sipil yang dimediasi digital mengubah frustrasi laten menjadi protes massa terkoordinasi, memperkuat tantangan terhadap kepercayaan institusi. Analisis menempatkan peristiwa ini dalam kerangka kelemahan struktural "koalisi gemuk" di Indonesia, menunjukkan bagaimana ketiadaan oposisi legislatif efektif memicu impunitas elite dan erosi etika. Temuan menyoroti urutan kausal dari dinamika koalisi hingga kegagalan pengawasan, pelanggaran elite, mobilisasi sipil, dan krisis legitimasi. Studi menyimpulkan bahwa tanpa reformasi mendasar untuk memperkuat mekanisme cek dan keseimbangan terutama oposisi legislatif fungsional demokrasi Indonesia rentan terhadap siklus berulang impunitas elite dan ketidakpercayaan publik.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Etika publik dan legitimasi demokrasi merupakan dua pilar fundamental yang menopang keberlangsungan negara demokratis. Etika publik, dalam konteks ini, melampaui sekadar penghindaran korupsi; ia mencakup kewajiban moral pejabat publik untuk melayani kepentingan umum dengan empati, akuntabilitas, dan integritas [1]. Ia menuntut agar kekuasaan dijalankan tidak hanya sesuai dengan legalitas hukum, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dapat dipertanggungjawabkan kepada warga negara. Legitimasi demokrasi, di sisi lain, dapat dipahami sebagai sebuah kontrak sosial di mana kepercayaan publik (*public trust*) diberikan kepada pemegang kekuasaan sebagai imbalan atas hak untuk memerintah. Kontrak ini bersifat dinamis dan bergantung pada persepsi publik terhadap perilaku moral dan hukum para elite negara. Ketika perilaku elite dianggap mengkhianati kepentingan publik, fondasi legitimasi institusi negara akan tergerus [2].

Kontroversi yang meletus pada Agustus 2025 mengenai tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menjadi sebuah titik kritis yang membawa konsep-konsep teoretis ini ke dalam fokus praktis yang tajam. Usulan kenaikan dan penambahan tunjangan yang fantastis, termasuk tunjangan perumahan sebesar 50 juta rupiah per bulan bagi setiap anggota, terjadi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, di mana banyak warga negara berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar [3]. Peristiwa ini berfungsi sebagai studi kasus yang kuat mengenai apa yang dapat disebut sebagai "resesi etik", di mana kegagalan elite legislatif dalam menunjukkan kepekaan dan etika publik memicu krisis legitimasi yang parah bagi salah satu institusi demokrasi terpenting di Indonesia [4].

Penelitian ini membedakan dirinya dari studi-studi sebelumnya mengenai kinerja legislatif di Indonesia oleh Nugroho, Duile & Bens dengan secara eksplisit menghubungkan kegagalan etis yang spesifik ini dengan kelemahan struktural sistem politik dan kekuatan baru masyarakat sipil yang dimediasi secara digital sebagai mekanisme akuntabilitas utama [5][6]. Analisis ini tidak hanya berfokus pada besaran tunjangan, tetapi juga pada wacana dan perilaku elite yang menyertainya, yang secara kolektif menunjukkan keterputusan mendalam dari realitas sosial warga negara. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membedah bagaimana impunitas elite, yang diperkuat oleh kelemahan struktural politik, berbenturan dengan kewarganegaraan

digital yang semakin berdaya, dan pada akhirnya menyingkap keretakan mendalam pada fondasi demokrasi Indonesia. Analisis ini mengungkapkan bahwa krisis tersebut bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan sebuah gejala dari masalah sistemik yang lebih besar terkait akuntabilitas, representasi, dan kesehatan demokrasi secara keseluruhan.

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini dipandu oleh tiga pertanyaan penelitian utama yang akan menstrukturkan analisis pada bagian selanjutnya:

- a. Bagaimana wacana dan tindakan anggota parlemen selama kontroversi tunjangan pada Agustus 2025 merupakan kegagalan etika publik yang signifikan dan mengungkap keterputusan yang mendalam dari warga negara yang mereka wakili?
- b. Dengan cara apa respons sipil, yang diorganisir dan diperkuat melalui media sosial, berfungsi sebagai tantangan langsung terhadap legitimasi demokrasi legislatif, mengubah sengketa kebijakan menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas?
- c. Apa yang diungkapkan oleh dinamika perilaku elite dan respons sipil dalam kasus ini mengenai kesehatan struktural demokrasi Indonesia yang mendasarinya, terutama terkait fungsi pengawasan legislatif, akuntabilitas politik, dan peran oposisi?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus kualitatif untuk menganalisis secara mendalam kontroversi tunjangan DPR pada Agustus 2025. Pendekatan utama yang digunakan adalah analisis wacana kritis terhadap berbagai sumber data primer, termasuk laporan berita dari media nasional dan internasional yang meliput peristiwa tersebut dari awal hingga akhir [3]. Data empiris ini kemudian disintesis dengan tinjauan literatur akademis yang relevan dari jurnal-jurnal terkemuka, mencakup topik-topik seperti politik Indonesia, etika publik, teori demokrasi, konflik elite, serta peran media sosial dalam gerakan sosial. Pendekatan metodologis ini memungkinkan analisis yang kaya dan kontekstual, yang mampu menghubungkan sebuah peristiwa spesifik dengan fenomena teoretis dan struktural yang lebih luas, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika krisis dan implikasinya [7].

B. PEMBAHASAN

1. Anatomi Krisis Etis: Tunjangan, Arogansi, dan Keterputusan Elite

Kontroversi tunjangan DPR pada Agustus 2025 merupakan sebuah studi kasus klasik tentang kegagalan etis yang berakar pada isolasi elite dari realitas publik. Analisis terhadap kronologi peristiwa ini menunjukkan bahwa krisis tidak hanya dipicu oleh angka-angka finansial yang diperdebatkan, tetapi secara signifikan diperburuk oleh wacana yang digunakan oleh para anggota parlemen [8]. Wacana tersebut secara kolektif menampilkan kurangnya empati, arogansi, dan pengabaian terhadap etos pelayanan publik yang seharusnya menjadi landasan moral mereka.

Krisis ini bermula dari pernyataan Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, pada 19 Agustus 2025, yang secara keliru mengumumkan kenaikan fantastis pada berbagai tunjangan, termasuk tunjangan beras hingga 12 juta rupiah dan tunjangan bensin hingga 7 juta rupiah per bulan. Meskipun sehari kemudian ia meralat pernyataannya dan mengklaim data tersebut tidak akurat, "klarifikasi" tersebut gagal meredakan kemarahan publik. Hal ini disebabkan karena dalam klarifikasinya, ia justru mengonfirmasi adanya tunjangan perumahan baru sebesar 50 juta rupiah per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas.¹¹ Konfirmasi ini memperkuat persepsi publik tentang adanya fasilitas mewah baru bagi para elite di tengah kesulitan ekonomi rakyat.

Situasi semakin memburuk dengan munculnya pernyataan-pernyataan dari anggota dewan lainnya yang menunjukkan keterputusan total dari sentimen publik. Anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Nafa Urbach, secara terbuka membela tunjangan perumahan tersebut dengan alasan untuk memudahkan perjalanannya dari Bintaro ke Senayan, sebuah justifikasi yang dianggap sangat tidak peka. Puncak dari arogansi elite ditunjukkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, yang menanggapi kritik publik dengan menyebut para pengkritik sebagai "orang tolol sedunia" [9]. Pernyataan ini, ditambah dengan tindakan anggota DPR lain seperti Eko Patrio yang mengunggah video parodi yang dianggap mengejek kritik publik, secara kolektif membangun narasi tentang sebuah kelas politik yang arogan, tidak tersentuh, dan memandang rendah aspirasi warga negara yang mereka wakili [3].

Serangkaian pernyataan dan tindakan ini bukanlah insiden-insiden terpisah, melainkan gejala dari sebuah patologi yang lebih dalam: sebuah elite politik yang begitu terisolasi oleh *privilege* dan kekuasaan sehingga kehilangan kapasitas untuk berempati dan memiliki kesadaran diri politik [10]. Pernyataan-pernyataan tersebut

mengungkapkan cara pandang di mana kenyamanan pribadi (seperti perjalanan Nafa Urbach) dan status elite menjadi prioritas utama, sementara kritik publik tidak dianggap sebagai umpan balik yang sah, melainkan sebagai gangguan dari pihak yang tidak mengerti. Isolasi ini tidak hanya bersifat psikologis tetapi juga struktural. Ketiadaan oposisi yang kuat dan rasa aman berada dalam "koalisi gemuk" (akan dibahas lebih lanjut) menghilangkan insentif politik bagi para elite untuk tetap peka terhadap sentimen publik. Akibatnya, terjadi kerusakan fundamental pada tugas etis representasi, di mana wakil rakyat tidak lagi merepresentasikan suara dan perasaan rakyat.

Tabel 1. Kronologi Kontroversi Tunjangan DPR dan Pernyataan Kunci (Agustus 2025)

Tanggal	Aktor/Institusi	Pernyataan/Tindakan Kunci	Respons Publik/Masyarakat Sipil
19 Agustus	Adies Kadir (Wakil Ketua DPR)	Mengumumkan kenaikan signifikan tunjangan beras dan bensin, serta tunjangan perumahan Rp 50 juta.	Kemarahan publik meluas di media sosial.
20 Agustus	Adies Kadir (Wakil Ketua DPR)	Meralat pernyataan sebelumnya, namun mengonfirmasi tunjangan perumahan Rp 50 juta.	Publik tidak percaya dan tetap fokus pada tunjangan perumahan.
22 Agustus	Nafa Urbach (Anggota DPR)	Membela tunjangan perumahan dengan alasan kemacetan dari Bintaro ke Senayan.	Dikecam secara luas karena dianggap tidak berempati.
22 Agustus	Ahmad Sahroni (Wakil Ketua Komisi III DPR)	Menyebut pengkritik DPR sebagai "orang tolol sedunia".	Memicu kemarahan yang lebih besar dan memperkuat citra arogansi DPR.
25 Agustus	Mahasiswa, Buruh, Aktivis	Demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR menuntut pembatalan tunjangan dan pembubaran DPR.	Aksi direspons dengan tindakan pengamanan ketat.
28 Agustus	Aparat Keamanan & Demonstran	Demonstrasi berlanjut, terjadi bentrokan. Affan Kurniawan,	Memicu gelombang protes yang lebih besar

		seorang pengemudi ojek online, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob.	dan kemarahan atas kebrutalan aparat.
29-31 Agustus	Demonstran & Pimpinan Partai/Pemerintah	Kerusuhan meluas di beberapa titik. Pimpinan partai dan Presiden Prabowo akhirnya merespons dengan mengevaluasi dan mencabut tunjangan serta moratorium kunker.	Protes perlahan mereda, namun krisis kepercayaan terhadap DPR tetap mendalam.

2. Agora Digital: Media Sosial sebagai Katalisator Pembangkangan Sipil

Peran media sosial dalam krisis ini sangat krusial, berfungsi sebagai infrastruktur yang mengubah ketidakpuasan publik yang tersebar menjadi sebuah gerakan protes yang terkoordinasi dan berdampak tinggi. Platform digital seperti Twitter, Instagram, dan TikTok bertindak sebagai "agora digital" atau ruang publik baru, tempat warga negara dapat berkumpul secara virtual untuk mengkritik kekuasaan dan mengorganisir perlawanan kolektif ketika saluran-saluran formal dianggap buntu atau tidak efektif [11]. Analisis ini sejalan dengan literatur akademis yang mengonseptualisasikan media sosial sebagai alat untuk memobilisasi aksi massa, meluncurkan protes, dan membentuk sebuah "demokrasi baru" di era digital Indonesia [12].

Protes yang terjadi bukanlah gerakan spontan, melainkan hasil dari mobilisasi yang terorganisir dan diperkuat melalui penggunaan tagar, meme, dan kampanye daring. Praktik ini menggemakan keberhasilan gerakan-gerakan digital sebelumnya di Indonesia, seperti #ReformasiDikorupsi pada 2019 dan #TolakOmnibusLaw pada 2020, yang menunjukkan kemampuan media sosial dalam membangun kesadaran publik dan menekan pemerintah [13]. Media sosial memungkinkan diseminasi informasi yang sangat cepat mengenai rincian tunjangan, penyebaran viral pernyataan-pernyataan kontroversial para politisi, dan koordinasi logistik untuk aksi unjuk rasa di Jakarta dan kota-kota lainnya. Tragedi tewasnya seorang pengunjung rasa, Affan Kurniawan, yang terlindas kendaraan aparat, segera menjadi berita viral di media sosial. Amplifikasi digital atas peristiwa ini memicu kemarahan yang lebih luas dan memperkuat narasi tentang represi negara terhadap protes yang sah, yang pada gilirannya memobilisasi lebih banyak orang untuk turun ke jalan. Hal ini membuktikan bahwa aktivisme digital dalam kasus ini

bukanlah sekadar "*slacktivism*" (aktivisme pasif), melainkan memiliki hubungan kausal yang kuat dengan aksi kolektif luring yang nyata dan berdampak [14].

Intensitas reaksi publik yang luar biasa besar menunjukkan bahwa kemarahan tersebut tidak hanya proporsional terhadap isu tunjangan semata. Kontroversi ini berfungsi sebagai "peristiwa pemicu" (*trigger event*) yang melepaskan akumulasi frustrasi publik selama bertahun-tahun terhadap kinerja DPR. Kemarahan ini bukan hanya tentang uang; ia adalah sebuah referendum atas persepsi publik terhadap institusi tersebut yang dianggap korup, disfungsi secara legislatif seperti yang terlihat pada pengesahan tergesa-gesa UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK dan minim akuntabilitas [15]. Kecepatan dan skala mobilisasi media sosial menjadi begitu efektif karena ia berhasil menyentuh sumber ketidakpercayaan publik yang sudah lama terpendam. Isu tunjangan menjadi katalisator yang mengubah krisis laten dan kronis menjadi krisis akut. Media sosial berperan sebagai akselerator, memungkinkan warga untuk secara instan menghubungkan keluhan baru ini dengan pola panjang perilaku elite yang dianggap menyimpang. Hal ini menciptakan sebuah narasi pemersatu yang kuat: "kita" (rakyat) versus "mereka" (elite korup).

3. Kelemahan Struktural dan Krisis Legitimasi: 'Koalisi Gemuk' dan Disfungsi Legislatif

Analisis krisis ini tidak akan lengkap tanpa mengangkatnya dari level peristiwa ke level sistemik. Kegagalan etis dan tantangan legitimasi yang terjadi dimungkinkan oleh sebuah kelemahan struktural fundamental dalam demokrasi kontemporer Indonesia: fenomena "koalisi gemuk" (*koalisi gemuk*) [16]. Konsep ini merujuk pada sebuah lanskap politik di mana hampir semua partai politik besar bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Praktik ini secara efektif menetralkan fungsi oposisi di parlemen, dan sebagai konsekuensinya, melumpuhkan fungsi pengawasan (*oversight*) legislatif terhadap eksekutif dan terhadap dirinya sendiri.

Dengan tidak adanya penyeimbang institusional yang berarti di dalam parlemen, mekanisme kontrol utama terhadap kekuasaan bergeser ke aktor-aktor eksternal: masyarakat sipil, media, dan publik secara umum. Rasa impunitas yang ditunjukkan oleh anggota DPR selama kontroversi tunjangan dapat secara langsung diatribusikan pada dinamika ini; mereka bertindak dengan asumsi bahwa tidak akan ada konsekuensi politik yang signifikan dari dalam sistem. Pengesahan berbagai undang-undang kontroversial di masa lalu, seperti UU Cipta Kerja dan revisi UU TNI, meskipun mendapat penolakan masif

dari publik, adalah contoh nyata dari kelumpuhan fungsi pengawasan ini. Parlemen, yang seharusnya menjadi arena deliberasi, berubah menjadi lembaga afirmatif bagi kebijakan eksekutif dan kepentingan elite internal.

Oleh karena itu, protes Agustus 2025 merepresentasikan sebuah momen ketika mekanisme kontrol eksternal ini diaktifkan secara paksa. Krisis ini menunjukkan sebuah tegangan inti dalam sistem presidensial multipartai Indonesia: ketika politik koalisi yang inklusif menghilangkan oposisi legislatif, legitimasi demokrasi menjadi sangat tidak stabil dan bergantung pada dinamika protes publik yang tidak dapat diprediksi, yang sering kali dimediasi oleh teknologi digital.

Terdapat sebuah alur kausal yang jelas yang menghubungkan struktur politik Indonesia dengan krisis legitimasi 2025. "Koalisi gemuk" berfungsi sebagai variabel independen yang menciptakan lingkungan akuntabilitas yang lemah. Lingkungan ini, pada gilirannya, memungkinkan terjadinya kegagalan etis di kalangan elite, yang kemudian menjadi penyebab langsung bagi tantangan legitimasi dari publik yang dimobilisasi secara digital. Rantai kausal ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Kelemahan Struktural (Koalisi Gemuk) → Disfungsi Institusional (Pengawasan Lemah) → Perilaku Elite (Impunitas & Pelanggaran Etis) → Respons Sipil (Kemarahan yang Diperkuat Digital) → Hasil Sistemik (Krisis Legitimasi). Kerangka ini memberikan model untuk memahami bagaimana krisis serupa dapat meletus di masa depan dan secara langsung menghubungkan antara struktur politik, budaya politik, dan kepercayaan publik.

C. KESIMPULAN

Protes terhadap tunjangan DPR pada Agustus 2025 lebih dari sekadar skandal politik sesaat; ia adalah manifestasi kritis dari krisis ganda yang tertanam dalam demokrasi Indonesia. Pertama, peristiwa ini menyingkap defisit etika publik yang parah di kalangan elite politik yang terisolasi oleh kekuasaan struktural. Kedua, ia menunjukkan betapa rapuhnya legitimasi demokrasi DPR, yang runtuh ketika dihadapkan pada masyarakat sipil yang bersatu dan termobilisasi secara digital. Krisis ini menegaskan kembali alur kausal di mana model "koalisi gemuk", meskipun mungkin menawarkan stabilitas eksekutif, menciptakan kekosongan akuntabilitas yang berbahaya. Kekosongan ini mengundang tantangan legitimasi dari luar sistem politik formal, dengan media sosial sebagai arena utamanya.

Implikasi jangka panjang dari peristiwa ini sangat signifikan. Di satu sisi, respons sipil yang kuat menyoroti ketahanan sentimen demokrasi di Indonesia. Namun, di sisi lain, ketergantungan pada protes massa sebagai mekanisme akuntabilitas utama menandakan masa depan politik yang berpotensi tidak stabil dan bergejolak. Tanpa reformasi fundamental yang memperkuat mekanisme kontrol dan keseimbangan institusional terutama melalui kehadiran oposisi legislatif yang kuat dan fungsional—siklus impunitas elite yang diikuti oleh kemarahan publik kemungkinan besar akan menjadi fitur berulang dalam demokrasi Indonesia. Siklus ini secara terus-menerus akan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi-institusi intinya, membahayakan konsolidasi demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Patarai, B. Burhanuddin, and A. Saleh, "Analisis Pemilihan Serentak Ketua RW dan Ketua RT Kota Makassar Ditinjau Dari Aspek Etika Politik," *J. Pallangga Praja*, vol. 2, no. 1, pp. 96–118, Apr. 2020, doi: 10.33701/jpp.v2i1.1640.
- [2] D. B. Resnik, "Scientific Research and the Public Trust," *Sci. Eng. Ethics*, vol. 17, no. 3, pp. 399–409, Sep. 2011, doi: 10.1007/s11948-010-9210-x.
- [3] Kate Lamb and agencies, "Protests erupt in Indonesia over privileges for parliament members and 'corrupt elites,'" *The Guardian*. [Online]. Available: <https://www.theguardian.com/world/2025/aug/26/indonesia-protests-austerity-parliament-member-privileges>
- [4] N. S. Love and M. Mattern, "The Great Recession: Causes, Consequences, and Responses," *New Polit. Sci.*, vol. 33, no. 4, pp. 401–411, Dec. 2011, doi: 10.1080/07393148.2011.619815.
- [5] C. D. H. Nugroho, "A comparative analysis of electoral systems in Indonesia and the Philippines: Structure, process, and political representation," *J. Inov. Ilmu Sos. dan Polit.*, vol. 7, no. 1, pp. 80–94, May 2025, doi: 10.33474/jisop.v7i1.23422.
- [6] T. Duile and J. Bens, "Indonesia and the 'conflictual consensus': a discursive perspective on Indonesian democracy," *Crit. Asian Stud.*, vol. 49, no. 2, pp. 139–162, Apr. 2017, doi: 10.1080/14672715.2017.1295358.
- [7] S. Anthony and S. Jack, "Qualitative case study methodology in nursing research: an integrative review," *J. Adv. Nurs.*, vol. 65, no. 6, pp. 1171–1181, Jun. 2009, doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.04998.x.
- [8] M. Morgan and P. Baert, "Chronology of Events," in *Conflict in the Academy*, London: Palgrave Macmillan UK, 2015, pp. 11–22. doi: 10.1057/9781137521309_2.
- [9] CNN Indonesia, "Kronologi Viral Gaji DPR Rp3 Juta per Hari-Dapat Uang Beras Rp12 Juta," CNN Indonesia. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250821092250-532-1264714/kronologi-viral-gaji-dpr-rp3-juta-per-hari-dapat-uang-beras-rp12-juta>
- [10] J. Higley, "Elite Theory and Elites," in *Handbook of Politics*, 2010, pp. 161–176. doi: 10.1007/978-0-387-68930-2_9.

- [11] G.-G. Hognogi, M. Meltzer, F. Alexandrescu, and L. Ștefănescu, "The role of citizen science mobile apps in facilitating a contemporary digital agora," *Humanit. Soc. Sci. Commun.*, vol. 10, no. 1, p. 863, Nov. 2023, doi: 10.1057/s41599-023-02358-7.
- [12] D. T. Hill and K. Sen, "The Internet in Indonesia's new democracy," *Democratization*, vol. 7, no. 1, pp. 119–136, Mar. 2000, doi: 10.1080/13510340008403648.
- [13] M. Gray-Hawkins, "Collective movements, digital activism, and protest events: The effectiveness of social media concerning the organization of large-scale political participation," *Geopolit. Hist. Int. Relations*, vol. 10, no. 2, pp. 64–69, 2018, doi: 10.22381/GHIR10220188.
- [14] J. Dennis, *Beyond Slacktivism*. Cham: Springer International Publishing, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-00844-4.
- [15] D. Tomsa, "Regime resilience and presidential politics in Indonesia," *Contemp. Polit.*, vol. 24, no. 3, pp. 266–285, May 2018, doi: 10.1080/13569775.2017.1413502.
- [16] M. Susanto, S. D. Harijanti, F. Manan, W. Dramanda, and M. Y. A. Hernawan, "Fat Coalition and Crown-Presidentialism: A Critical Review of Indonesia's Concurrent Elections," *PETITA J. Kaji. Ilmu Huk. dan Syariah*, vol. 10, no. 1, pp. 35–54, Feb. 2025, doi: 10.22373/petita.v10i1.757.